



JURNAL Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

KIPRAH SUPENI PUDJOBUNTORO DI BIDANG POLITIK TAHUN 1945-1963 SEBAGAI NARASI PEREMPUAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Ananda Putri Salsa Bella*^a, Arif Subekti^a

ananda.putri.2007316@students.um.ac.id

^aUniversitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, 65155, Indonesia.

Article history:

Received 4 December 2023; Revised 18 December 2023; Accepted 20 December 2023; Published 24 December 2023

Abstract: *The involvement and role of women in various fields of life, especially in the political field during the Soekarno Order era, is still less displayed in history. Even though many female figures have made great contributions to Indonesian politics, one of them is Supeni Pudjobuntoro, an ambassador traveling around Indonesia. This article aims to present the female figure as part of agency in historiography. This study describes the history of women through Supeni in the field of politics after independence, precisely in 1945-1963 using historical research methods with five stages, namely topic selection, heuristics in the form of source collection, verification or criticism of sources, interpretation to determine the credibility of historical sources based on facts, and historiography or writing historical facts chronologically. The results of this study show that Supeni had a large share in politics in Indonesia, especially in the era of the Indonesian National Revolution and the leadership of President Soekarno. Supeni was active in organizing the first General Election in 1955 representing the PNI, carried out his foreign policy duties well by lobbying the countries concerned, and contributed to the liberation of West Irian.*

Keywords: *Supeni; women; politics.*

Abstrak: Keterlibatan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan terutama di bidang politik pada masa Orde Soekarno masih kurang ditampilkan dalam sejarah. Padahal banyak tokoh perempuan yang memiliki kontribusi besar bagi politik Indonesia, salah satunya adalah Supeni Pudjobuntoro seorang duta besar keliling Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menghadirkan sosok perempuan sebagai bagian dari agensi dalam historiografi. Penelitian ini memaparkan sejarah perempuan melalui Supeni dalam bidang politik masa setelah kemerdekaan tepatnya pada tahun 1945-1963 dengan menggunakan metode penelitian historis dengan lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik berupa pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi untuk mengetahui kredibilitas sumber sejarah berdasarkan fakta-fakta, dan historiografi atau penulisan fakta sejarah secara kronologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Supeni memiliki andil yang besar dalam politik di Indonesia terutama di era Revolusi Nasional Indonesia dan kepemimpinan Presiden Soekarno. Supeni turut aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama tahun 1955

mewakili PNI, menjalankan tugas politik luar negeri dengan baik dengan melobi negara-negara yang bersangkutan, dan andil dalam pembebasan Irian Barat.

Kata kunci: Supeni; perempuan; politik.

PENDAHULUAN

Laki-laki menempati posisi yang dominan dalam historiografi. Posisi dominan ini, disebabkan karena beberapa faktor dan didukung dengan tiga teori mengenai dominasi laki-laki di masyarakat yaitu laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih agresif sehingga identik dengan perang, dan laki-laki harus kompetitif untuk bersaing (Harari, 2011). Tiga teori ini menyatakan bahwa laki-laki dipandang sebagai makhluk yang superior jika dibandingkan dengan perempuan, sementara perempuan hanya diwajibkan untuk terus patuh terhadap laki-laki terutama suaminya. Dominasi laki-laki di dalam kehidupan bukan menjadi suatu hal yang baru justru sudah tertanam sejak dulu dan telah menjadi budaya, laki-laki memperoleh posisi tertinggi di segala aspek kehidupan. Sejarah Nasional Indonesia, juga memiliki kecenderungan untuk menempatkan laki-laki dalam posisi yang dominan, sebaliknya mendudukkan peran perempuan dalam posisi subordinat (Subekti, 2021). Posisi subordinat yang melekat pada diri perempuan terjadi akibat dari adanya subordinasi perempuan, yaitu anggapan bahwa perempuan lebih rendah atau lemah daripada laki-laki. Hal ini terlihat pada pembatasan peranan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan kurang tegas dalam mengambil keputusan karena mengedepankan perasaan sehingga tidak dapat memimpin dalam ruang publik (Karwati, 2021). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data dari Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2KRS) Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa sampai pada tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki 191 pahlawan nasional dengan perbandingan jauh antara pahlawan laki-laki dan pahlawan perempuan yaitu 176 laki-laki dan 15 perempuan. Perbedaan yang jauh ini membuktikan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan sangat besar, perempuan sangat terbatas untuk menempati posisi di ruang publik.

Dominasi laki-laki pada ruang publik terlihat pada penulisan sejarah atau historiografi, baik di kancah nasional maupun internasional. Tokoh laki-laki sering ditampilkan menjadi sosok utama yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan terutama dalam memperjuangkan dan mengisgi kemerdekaan. Laki-laki tampil menjadi aktor dalam perang melawan penjajah, pemimpin suatu daerah, dan berdiplomasi di kancah internasional. Keterlibatan laki-laki disoroti sebagai hal yang lumrah dan umum karena stigma perjuangan identik dengan laki-laki di dalamnya, hal ini menggambarkan bahwa historiografi di Indonesia bersifat mendiskriminasi jenis kelamin atau mengesampingkan tokoh perempuan di dalamnya (Yulia, 2016). Dominasi laki-laki dalam historiografi membuat perempuan menjadi sosok marginal dan kurang disebut sebagai aktor utama dalam sejarah, hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa perlawanan menentang Belanda, sosok pemimpinnya adalah laki-laki seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Maluku, dan sebagainya. Bahkan sosok pahlawan perempuan seperti Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu,

Nyi Ageng Serang, Cut Meutia, dan lainnya ditampilkan dalam sosok yang maskulin. Cut Nyak Dien dalam visual buku teks Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI kelas XI semester 1 tahun 2017 ditampilkan secara menonjol dibandingkan tokoh-tokoh lain di sekelilingnya yang disinyalir sebagai pengikutnya dari Aceh. Selain itu di bawah visual gambar tersebut terdapat narasi mengenai perjuangan Cut Meutia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perlawanan fisik (Utami, 2021). Perempuan-perempuan seperti mereka memimpin jalannya perang di daerahnya masing-masing dengan sikap yang tidak direpresentasikan layaknya kaum perempuan pada umumnya. Mereka direpresentasikan sebagai sosok perempuan gagah berani menghadapi musuh-musuh serta menentang penjajahan di Hindia-Belanda, terlebih lagi mereka rela apabila gugur di medan perang, dasingkan atau dibuang, bahkan dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Keterlibatan sosok-sosok tersebut seharusnya menjadi pembahasan yang menarik dalam penulisan sejarah atau historiografi di Indonesia karena belum ada yang menyoroti perempuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari perspektif perempuan, tulisan-tulisan sejarah mengenai perempuan selalu dikaitkan dengan sifat yang berhubungan dengan laki-laki. Para kritikus gender, dalam studi ilmu sosial humaniora telah banyak menawarkan model penggambaran perempuan, yang feminin, domestik, atau keibuan sebagai hal yang dapat diterima sebagai agensi dalam penulisan sejarah. Dalam Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928, para perempuan menyampaikan pidato-pidato mengenai peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, para perempuan juga mulai sadar untuk memperjuangkan hak-haknya terutama untuk mencapai kesetaraan gender (Blackburn, 2007). Namun masih banyak yang belum mengkritisi penggambaran perempuan dalam ranah publik secara feminis.

Penulisan sejarah mengenai pahlawan tokoh laki-laki dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan perempuan, laki-laki dalam historiografi ditampilkan sesuai karakteristik yang melekat pada dirinya yakni sebagai sosok yang memiliki keberanian tinggi, berjiwa besar, tangguh dan kuat. Selain itu pada masa setelah kemerdekaan atau di era Revolusi Soekarno hanya laki-laki yang ditampilkan ke depan melawan kembali Belanda dalam melancarkan agresi militernya sedangkan perempuan berada di belakangnya mengelola dapur umum. Perempuan hanya ditampilkan sebagai sosok dalam bidang domestik mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga seperti memasak, mengurus anak, dan melayani suami. Sejarah menyatakan bahwa seolah-olah perempuan merupakan manusia penyumbang atau pelengkap kehidupan, dengan kata lain perempuan adalah kelompok manusia kelas kedua di bawah laki-laki. Pada hakikatnya perempuan tidak dapat berdiri sejajar dengan laki-laki padahal sebagai manusia keduanya memiliki peranan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan (Kuntowijoyo, 2003). Padahal pada realitasnya yang didukung dengan bukti historis, perempuan memiliki keterlibatan besar dalam mengisi kemerdekaan, terutama di bidang diplomasi maupun politik luar negeri. Keterlibatan perempuan dapat dilihat dari gerakan internasional untuk melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di negara-negara seperti Asia dan Afrika, termasuk Indonesia (Wulandari, 2021). Menurut Utama Sena (2017) bahkan pasca penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika para aktivis, mahasiswa, maupun kaum feminis terus menyuarkan Bandung spirit untuk membela hak asasi manusia terkait

beberapa isu di lingkungan masyarakat, hal ini didasarkan pada semangat melawan kolonialisme di masa lalu. Perempuan menjadi tokoh penting bagi terbentuknya suatu negara jauh sebelum gencarnya perjuangan diplomasi. Banyak perempuan yang gagah berani tampil ke medan perang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, keberanian tersebut membuktikan bahwa peranan perempuan di era perjuangan kemerdekaan telah berlangsung lama. Salah satu perlawanan fisik yang dilakukan adalah perlawanan di Minangkabau oleh Siti Manggopoh pada awal tahun 1908 untuk menentang kebijakan pajak atau belasting Belanda yang terlalu memberatkan masyarakat setempat, Siti mampu menumpas sekitar 55 prajurit Belanda dengan menggunakan senjata kelewang (Arsa, 2017). Selama masa-masa tersebut kaum perempuan memainkan dua peran, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun memperjuangkan hak-haknya. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mereka mampu melawan praktik kolonialisme, menyetarakan kedudukan sosialnya dengan laki-laki, dan terlibat aktif dalam bidang politik.

Kajian tentang peran perempuan dalam kehidupan politik sangat penting untuk dilakukan agar suara perempuan lebih bisa didengar. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa wanita seringkali dianggap sebagai manusia kelas kedua yang hanya berkutat pada kehidupan domestik seperti dapur, sumur, dan kasur. Perempuan dianggap tidak pernah andil dalam pembentukan sejarah dan hanya berperan sebagai sosok pendamping laki-laki yang memiliki pengaruh atau dominasi dalam ranah publik (Agustiningih, 2019). Jika hal ini terus terjadi maka tidak akan ada kesetaraan gender seperti yang telah diperjuangkan para tokoh perempuan terdahulu antara lain R.A Kartini dan Dewi Sartika, mereka telah mengupayakan adanya pendidikan untuk kaum perempuan Indonesia. Bahkan akan muncul banyak diskriminasi terhadap perempuan-perempuan karena posisinya terpinggirkan akibat dari implementasi budaya patriarki yang mendarah daging pada beberapa daerah di Indonesia. Patriarki juga mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam bidang politik yaitu pembatasan peranannya dalam menjalankan politik terlebih lagi di kursi kepemimpinan. Sistem yang menempatkan kaum laki-laki sebagai aktor utama membuat posisinya jauh lebih tinggi di bidang politik sedangkan perempuan hanya dijadikan sebagai pengganti apabila keluarga laki-laki yang bersangkutan terkena masalah dan mengharuskannya keluar dari dunia politik. Dalam hal ini peran perempuan dalam kepemimpinan politik tidak berasal dari kemampuannya sendiri melainkan semata-mata dibantu oleh laki-laki (Kiftiyah, 2019). Penggambaran perempuan yang maskulin dan cenderung macho perlu dikritisi untuk dapat hadir dalam historiografi nasional sehingga dapat menghadirkan peran publik perempuan di luar konsep maskulin-macho, yang dalam batas tertentu dianggap aktivitas eksklusif laki-laki, yakni bidang politik.

Sebenarnya, dewasa ini keterlibatan perempuan dalam bidang politik menjadi isu-isu yang sering dibahas dan kajian tentang perempuan sudah banyak dilakukan, antara lain tentang kepemimpinan perempuan, peranan perempuan dalam kepemimpinan menjadi suatu hal yang istimewa karena jarang sekali dibahas jika dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki. Dalam kajian yang dilakukan Prastio,dkk (2021) kepemimpinan Airin Rachmy Diani Walikota Kota Tangerang

Selatan membawa banyak dampak positif terutama dalam pemenuhan kebutuhan anak dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin dan berkomitmen melakukan perubahan untuk memajukan daerahnya. Selain itu kajian lain tentang perempuan dilakukan oleh Mauliyah & Sinambela (2019) tentang perempuan yang dianggap sebagai manusia kelas kedua mampu memimpin sebuah perusahaan dan mengambil sebuah keputusan bisnis dengan bekal pendidikan. Pada bidang studi sejarah, tulisan tentang perempuan di ruang publik non-maskulin-macho diantaranya ditulis oleh Ruth Indiah Rahayu (2014), Susan Blackburn (2007), Cora Vreede-Stuers (2008), serta ratusan biografi tentang sosok Kartini seperti buku (Panggil Aku Kartini Saja (2003) dan Kartini Dari Sisi Lain Melacak Pemikiran Kartini Tentang Emansipasi Bangsa (2005), Sartika seperti buku Dewi Sartika, Srikandi Tanah Parahyangan (2011) dan Dewi Sartika (2021), Rohana Kudus seperti buku Rohana Kudus srikandi Indonesia Riwayat Hidup dan Perjuangannya (1980) dan Roehana Koeddoes Perempuan Sumatera Barat (2001), hingga Inggit Garnasih seperti buku Perempuan Dalam Hidup Sukarno: Biografi Inggit Garnasih (2007) dan Kisah-kisah Istimewa Inggit Garnasih (2020). Kajian tentang peran perempuan di masa kini sudah sering dibahas. Namun, tidak banyak yang membahas tentang peran perempuan di bidang politik pada masa awal kemerdekaan padahal tokoh perempuan seperti Supeni Pudjobuntoro memiliki peranan yang besar dalam bidang politik terutama dalam jalur diplomasi. Jalur diplomasi di Indonesia menempati posisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perjuangan fisik. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa jalur diplomasi pada masa itu dinilai kalah penting dan lebih menyoroti perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang cenderung maskulin. Perjuangan diplomasi di era ini juga menyoroti laki-laki sehingga perlu dijabarkan bagaimana perjuangan diplomasi yang diperankan oleh perempuan dan dinilai feminin, bagaimana perempuan menembus diskriminasi ganda atau berlapis dari historiografi maskulin.

Dari kajian-kajian yang telah ditinjau dapat digariskan bahwa peran perempuan dalam diplomasi dan politik luar negeri terutama pada masa awal kemerdekaan jarang dibahas karena masyarakat sering mengagungkan laki-laki sebagai tokoh sentral yang memiliki peran yang besar dalam bidang politik, selain itu dalam perjalanannya sosok laki-laki mendominasi historiografi di Indonesia. Oleh karena itu kajian ini dilakukan untuk menganalisis kiprah atau keterlibatan salah satu tokoh perempuan di bidang politik pada masa awal kemerdekaan. Tokoh yang akan dikaji adalah Supeni Pudjobuntoro, seorang pejuang pergerakan perempuan yang berasal dari Tuban. Beliau merupakan seorang politisi sekaligus diplomat yang memiliki jabatan penting di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sosok Supeni yang jarang diketahui oleh masyarakat awam ini memiliki wawasan luas dan gaya bicara lugas sehingga beliau menjadi salah satu tangan kanan dari Presiden Soekarno. Penulisan kajian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam kepenulisan sejarah perempuan dan menyelaraskan historiografi yang *androcentric* (berpusat pada laki-laki) dengan historiografi yang *androgynous* (berpusat pada perempuan).

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode historis yang terdiri dari beberapa tahapan seperti pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi atau analisis, dan historiografi atau penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Topik Sejarah yang dipilih adalah kontribusi Supeni dalam bidang politik pada tahun 1945-1963 dengan tahap heuristik berupa pengumpulan sumber primer berupa surat kabar Belanda, buku induk yang berjudul "Supeni Wanita Utusan Negara" karya Paul Tista, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu heuristik juga didukung oleh sumber dari artikel maupun buku mengenai sejarah perempuan maupun peran-peran perempuan dalam berbagai bidang. Tahap berikutnya adalah verifikasi untuk mengetahui keabsahan sumber yang telah diperoleh. Verifikasi atau kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal, kritik eksternal merupakan kritik untuk melihat keaslian sumber Sejarah dari segi fisiknya sedangkan kritik internal merupakan kritik untuk melihat kredibilitas suatu sumber sejarah dari isi kontennya agar sumber sejarah yang diperoleh bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu sudut pandang saja. Setelah mengetahui kredibilitas suatu sumber maka akan diperoleh fakta-fakta sejarah yang dihubungkan satu sama lain. Tahapan terakhir yaitu penulisan fakta sejarah secara kronologis membentuk historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Supeni Pudjobuntoro

Supeni Pudjobuntoro atau yang lebih dikenal dengan Nyonya Supeni lahir di Tuban pada 17 Agustus 1917, beliau merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Supeni lahir dari keluarga sederhana dengan seorang ibu yang buta huruf dan ayah bekerja sebagai pegawai kehutanan di Ngelo, Karesidenan Bojonegoro. Pada saat berada di kandungan, ayahnya yang bernama Sastrosupeno meninggal karena dibunuh dan beliau dibesarkan seorang diri oleh ibunya. Untuk menghidupi keluarganya Ibu dari Supeni yang bernama Musripah mendapatkan uang dari pensiunan janda sebesar 17.50 gulden/bulan. Supeni menempuh pendidikannya selama tujuh tahun di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yakni sekolah dasar berbahasa Belanda kemudian melanjutkannya di *Hollandsche Indische Kweekschool* (HIK) atau sekolah untuk persiapan menjadi guru selama enam tahun di Blitar (Tista, 1989).

Pada tahun 1931 terdapat persiapan cabang gerakan pemuda nasional (Indonesia Muda) di Blitar, Supeni tertarik dan segera bergabung. Selang beberapa bulan setelah beliau bergabung utusan Indonesia Muda dari Jakarta yang bernama Yusupadi meresmikan Indonesia Muda di Blitar menjadi cabang penuh. Dalam keterlibatannya menjadi aktivis Indonesia Muda Supeni terpilih menjadi wakil ketua dari partai politik bernama Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) mendampingi Sukarni sebagai ketuanya (Soewito et al., 1997). Selain itu beliau juga menjadi ketua keputrian Indonesia Muda yang bertugas mencatat pidato politik setiap kali ada kunjungan tokoh nasional dan menyampaikannya pada anggota lain yang tidak dapat hadir. Di usianya yang terbilang muda sekitar

14 tahun, beliau sudah mampu memahami pidato politik yang disampaikan dan sering menjadi pembicara pada saat rapat umum. Hal tersebut membuat Supeni mendapatkan banyak peringatan dari *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) atau badan inteljen politik pemerintah kolonial Belanda, namun beliau tidak pernah merasa takut. Tidak sampai disitu saja Supeni pernah dikeluarkan oleh sekolah karena terjun di dunia politik, beliau dikeluarkan dari sekolah saat tengah menempuh ujian kelas tiga di HIK karena kedapatan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang dianggap dapat membahayakan pendidikan padahal nilai-nilai yang dihasilkan terbilang cukup baik. Supeni kemudian berniat pindah ke *Meer Uitgebrid Lager Onderwijs* (MULO) atau sekolah menengah pertama namun tidak diterima karena terlibat dalam politik. Beliau terus mencari sekolah-sekolah lain hingga diterima di HIK Muhammadiyah. Meskipun berpolitik Supeni dapat membuktikan bahwa dirinya berprestasi dan mampu menjadi satu-satunya siswa yang lulus ujian negeri dari sembilan siswa lain di HIK Muhammadiyah.

Tidak lama setelah Supeni lulus, Jepang memasuki Indonesia dan melakukan praktik kolonialisme selama 3,5 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, Supeni melanjutkan kegiatan pergerakan bersama Fujinkai yakni organisasi perempuan bentukan Jepang di Madiun. Para Perempuan diajarkan dasar-dasar kemiliteran (Notosusanto, 2011). Selama berada di organisasi Fujinkai, Supeni beberapa kali menangani masalah kemanusiaan. Kegiatan ini dilanjutkannya dengan membantu korban perang selama periode Perang Revolusi melalui organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Hingga pada satu titik Indonesia mampu merebut haknya kembali dan mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Di masa-masa setelah kemerdekaan tepatnya pada era Revolusi Soekarno, Supeni memaksimalkan dirinya untuk terlibat ke dalam organisasi pergerakan perempuan sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan, beliau menjadi ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani) cabang Madiun pada Juni 1946, kemudian berhasil menjadi ketua umum Kowani tingkat pusat yang diselenggarakan di Yogyakarta dengan Maria Ulfah sebagai wakilnya. Kowani menjadi pelopor gerakan Perempuan di Jawa sebagai pusat perjuangan jalur diplomasi (Sujati & Ilfa Harfiatul Haq, 2020). Disela-sela kesibukannya dalam mengurus organisasi perempuan, Supeni mendaftarkan diri ke Partai Nasional Indonesia (PNI) karena beliau menganggap bahwa pengabdian yang diberikan kurang lengkap apabila tidak terjun ke sebuah partai politik dan pada dasarnya Supeni memiliki kemampuan di bidang politik.

Setelah bergabung di PNI Supeni berhasil masuk menjadi anggota Dewan Partai pada tahun 1949 dengan dibebani tugas menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama di Indonesia yang akan dilaksanakan tahun 1955. Selama bergabung di PNI Supeni berkontribusi penuh menyerahkan dirinya pada partai tersebut dengan sepenuh hati, hal ini dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran yang disumbangkannya seperti usulan mengenai tindak lanjut desas-desus PNI gadungan untuk menghindari perpecahan nasional karena ada dua kubu dalam satu partai. Tidak hanya itu Supeni juga berani menentang Presiden Soekarno apabila gagasan yang diberikan tidak seperti apa yang dikehendaki, sikap beliau yang tegas menjadikannya sebagai sosok perempuan yang disegani banyak orang. Karir Supeni di bidang politik berjalan dengan baik dan beliau mampu mengukir

prestasi-prestasi yang cemerlang. Dengan demikian Supeni sering disibukkan dengan tugas-tugas penting terutama saat menjadi Ketua *Inter-Parliamentary Union* Indonesia dan anggota *Inter-Parliamentary Union Council*. Supeni diharuskan menghadiri rapat-rapat untuk membahas isu internasional dan pada saat itu beliau terpilih menjadi penyusun laporan.

Supeni menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Soekarno karena tugas-tugas yang diberikan selalu dijalankan dengan baik, berbagai tugas dan tanggung jawab besar diserahkan kepada Supeni hingga menduduki jabatan-jabatan penting di Indonesia. salah satu jabatan yang identik dengan beliau adalah Duta Besar Keliling Indonesia yang bertugas mengelilingi atau mengunjungi negara-negara tujuan dalam kepentingan politik luar negeri. Pada awalnya Supeni ditawarkan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat namun sempat ditolak karena tidak tega meninggalkan Ibunya dan rasa cintanya pada PNI, beliau beranggapan bahwa apabila menjadi Duta Besar maka harus melepas partai politiknya sedangkan beliau sudah diberikan kepercayaan menjadi anggota DPR. Menurutnya tidak adil saja meninggalkan rakyat yang seharusnya diwakili aspirasinya dalam negara demi jabatan yang lebih tinggi. Presiden Soekarno terus berusaha meyakinkan Supeni agar menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat yaitu dengan memberikannya dispensasi bahwa selama menjabat Duta Besar Supeni tidak perlu keluar dari keanggotaan PNI, akhirnya beliau setuju dengan syarat hanya menjabat selama tiga tahun.

Diangkatnya Supeni sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden no.553/M/1960, secara resmi beliau ditugaskan mulai tanggal 18 September 1960. Belum sampai di posnya, Amerika Serikat ada pihak-pihak yang berusaha menggagalkan pemberangkatan Supeni menjadi Duta Besar. Pada akhirnya beliau mengajukan permohonan mengundurkan diri untuk menghindari munculnya permasalahan lain. Permohonan tersebut tidak segera dikabulkan oleh Presiden Soekarno selama empat bulan, kemudian Presiden kembali menawarkan jabatan sebagai Duta Besar Keliling Indonesia. Dalam hal ini Presiden memiliki wewenang dan hak prerogatif (hak istimewa) mengangkat atau memberhentikan Duta Besar sesuai waktu yang dikehendaki (Suroto, 2019). Hal ini menjadi awal dari karir Supeni sebagai Duta Besar Keliling Indonesia dengan masa tugas yang terhitung mulai dari tanggal 18 September 1960 menggantikan tanggal penugasan sebagai Duta Besar di Amerika yang gagal. Selama masa hidupnya Supeni terlibat aktif dalam berbagai kegiatan perempuan, menjadi anggota PNI, menjadi duta besar keliling untuk Indonesia, dan memiliki andil yang besar bagi pembebasan Irian Barat sehingga beliau menjadi perempuan yang paling berpengaruh di Indonesia pada saat itu. Supeni meninggal pada tahun 2004 karena terkena serangan stroke.

Keterlibatan Supeni Pudjobuntoro dalam Politik Indonesia Tahun 1945-1963

Kondisi Sosial Politik Masa Supeni

Kiprah Supeni dalam bidang politik dimulai pada masa awal kemerdekaan yaitu masa pemerintahan setelah kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1945-1966 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Masa awal kemerdekaan menjadi masa pembentukan tatanan politik yang stabil dan tidak terikat pada pemerintahan Belanda. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam membangun sebuah politik Indonesia sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila (Utama & Dewi, 2018). Pada awal masa orde baru Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan kepala negara dipegang oleh Presiden. Parlemen atau badan legislatif menjadi kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sehingga kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepadanya, kekuasaan parlemen juga menjadi faktor menguatnya para partai politik dalam suatu kabinet (Purnamawati, 2020). Salah satu program pemerintahan dari demokrasi ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955, setiap partai politik di Indonesia dapat dipilih untuk menempati kursi pemerintahan sebagai anggota badan konstituante dan DPR. Dalam hal ini Supeni sebagai anggota Dewan Partai PNI memiliki tugas penting yaitu mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum. Supeni harus mempelajari sistem pemilihan umum di negara-negara lain yang memiliki latar belakang sama dengan Indonesia, hal ini dilakukan untuk mematangkan pemilihan umum yang akan berlangsung. Negara yang dituju sebagai tempat mempelajari sistem pemilihan umum adalah India, pemilihan India sebagai negara tujuan dilatarbelakangi oleh persamaan kondisi negaranya dengan Indonesia yaitu banyaknya masyarakat yang masih buta huruf yaitu sekitar 40% dari jumlah seluruh penduduk di India (Khasyi'in, 2021).

Supeni beserta perwakilan dari Indonesia yang diketuai oleh Subagio Reksodipuro, S.H. berangkat ke India pada tahun 1951 untuk mempelajari jalannya pemilihan umum di sana selama kurang lebih dua bulan. Selang dari satu tahun tepatnya pada 28 Oktober 1952 Supeni diundang ke Amerika Serikat untuk mempelajari sistem pemilihan Presiden. Jadi Selain mempelajari pemilihan umum di India, Supeni juga mempelajari pemilihan umum di Amerika Serikat untuk mengetahui sistem kepartaian yang digunakan negara liberal (Metzelaar, 1953). Selama tiga bulan berada di Amerika dimanfaatkan beliau untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting seperti Ny. Elenor Roosevelt dan Dr. Polock (salah satu profesor ilmu politik dari Universitas Michigan) kemudian juga dengan organisasi League of Women Voters. Selain itu Supeni juga mendatangi tempat-tempat suku Indian untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh mereka saat pemilihan umum. Supeni terkesan dengan usaha para partai politik di Amerika Serikat yang rela mengeluarkan uang demi kampanye partainya di radio dan televisi. Sistem teknis pemilihan umum dan kepartaian di Amerika Serikat juga terkesan baik sehingga Supeni juga mempelajari dan menyerapnya untuk digunakan sebagai bekal dalam mempersiapkan pemilihan umum di Indonesia namun sistem tersebut tidak sepenuhnya diserap dan tetap menyesuaikan dengan kondisi negaranya (Kawat, 1953).

Setelah mempelajari pemilihan umum di negara India dan Amerika Serikat, Supeni sebagai ketua Badan Pekerja Aksi Pemilihan Umum Partai Nasional Indonesia (PAPU PNI) ditugasi untuk menyampaikan hasil yang diperoleh ke daerah-daerah di Indonesia khususnya daerah cabang PNI

sebagai petunjuk bagi anggota-anggota PNI dalam melakukan pemilihan secara benar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemenangan partainya. PNI selaku partai politik yang besar juga turut andil dalam mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) pemilihan umum yang disahkan pada tahun 1953. Dari pengesahan UU pemilihan umum tersebut mengakibatkan dibubarkannya panitia pemilihan pusat dengan ketua Iskandar Tedjasukmana dan dibentuk kembali panitia pemilihan Indonesia dengan ketua Hadikusumo. Pembentukan panitia-panitia pemilihan ini tidak terpusat pada negara saja melainkan daerah-daerah seperti Jakarta yang diketuai oleh Supeni (Tista, 1989). Pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1955 dimulai dengan pemilihan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada 29 September 1955 dan disusul dengan pemilihan konstituante pada 15 Desember 1955 (Notosusanto, 2011). Supeni juga diberikan tanggung jawab untuk menjadi panitia konstitusi yang bertugas menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemilihan untuk badan konstituante. Pada setiap rapat, Supeni yang memiliki idealitas tinggi selalu mengingatkan kepada rekan sesama anggotanya untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar dari PNI karena nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam berdemokrasi agar tercipta suatu sistem politik yang harmonis (Pasaribu, 2017).

Dalam perjalanan mempersiapkan pemilihan umum tahun 1955 Supeni dipercayakan mengemban beberapa tugas penting seperti menjadi ketua pemilihan umum di Jakarta (Schaap, 1957) dan beliau melakukannya secara maksimal sehingga diperoleh hasil yang maksimal juga yaitu terselenggaranya pemilihan umum pertama di Indonesia. Keberhasilan pemilihan umum pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dengan didorong oleh banyaknya partisipasi masyarakat. Andilnya masyarakat menjadi hal yang utama dalam berdemokrasi yaitu untuk mengisi suara-suara bagi calon-calon wakil rakyat. PNI berada pada urutan pertama atau *leading party* dengan suara terbanyak namun tidak mendapatkan kemenangan mutlak karena kalah dengan masyumi pada pemilihan umum di Jakarta (Ajeng, 2016). Pada pemilihan umum yang diselenggarakan Supeni terpilih untuk menjadi anggota DPR dan anggota Konstituante, di DPR Supeni menjadi ketua Seksi Luar Negeri dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Selain itu, Supeni dipilih menjadi anggota Dewan pimpinan partai dan dijadikan ketua Departemen Pendidikan dan Sosial PNI. Kepiawaian Supeni pada bidang politik mengantarkan kemerdekaan bagi perempuan khususnya dalam persamaan haknya dengan laki-laki di mata politik, perempuan mulai memiliki akses untuk berpolitik walaupun masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat pada pemilihan umum tahun 1955, jumlah perempuan yang duduk di kursi DPR berjumlah sekitar 16 orang dari berbagai organisasi partai seperti PNI, Gerwani, Muslimat Nahdatul Ulama, dan sebagainya (Kertati, 2019).

Supeni dalam Diplomasi Indonesia

Kontribusi Supeni di bidang politik bukan hanya semata-mata untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang politisi melainkan juga sebagai bentuk pengabdianya kepada Indonesia

khususnya sebagai pejuang pergerakan perempuan. Dalam bidang diplomasi Supeni memiliki peranan besar seperti mengajukan usul nasionalisasi Terusan Suez kepada parlemen (Van Vuren, 1956). Selain itu ikut terlibat dalam konferensi Asia Afrika, konferensi tingkat tinggi pada gerakan non blok, dan sebagainya. Diplomasi berkaitan erat dengan politik luar negeri yang di dalamnya terdapat negosiasi diantara negara-negara yang bermasalah, jalan penyelesaiannya berlangsung secara damai namun tidak menutup kemungkinan beralih pada jalur kekerasan apabila diplomasi tersebut menemukan jalan buntu (Prayuda, 2019). Supeni aktif dalam kegiatan diplomasi jauh sebelum beliau diangkat menjadi duta besar, tepatnya pada saat menjabat menjadi ketua Seksi Luar Negeri DPR. Diawali dengan undangan ke Jepang bersama rekan wartawan seperti Adam Malik, Yusuf Isak, Sanyoto, S. Tasrif, dan Dasyraf Rahman. Kemudian dilanjutkan dengan memenuhi undangan ke Mesir dari Presiden Gamal Abdul Nasser karena jasanya dalam menyumbangkan usul resolusi mengenai nasionalisasi Terusan Suez. Nasionalisasi Terusan Suez dilatarbelakangi oleh praktik kolonialisme yang dilakukan Inggris kepada Mesir selama bertahun-tahun yang berujung pada dijualnya saham Terusan Suez oleh Pemerintah Mesir (era kepemimpinan Khedevi Ismail) kepada Inggris pada tahun 1875 (Erasiah, 2019). Gamal Abdul Nasser atas dukungan usul resolusi Supeni segera melakukan nasionalisasi pada 26 Juli 1956 dengan tujuan mengembalikan kekuasaan teritorial Terusan Suez kepada Mesir dan hasil dananya digunakan untuk pembangunan bendungan Aswan sebagai penunjang pertanian. Dukungan penuh dari Supeni dan Delegasi Indonesia terhadap Mesir mendapatkan respon yang positif dari dunia internasional khususnya negara-negara di Timur Tengah.

Pada tahun 1957 Supeni sebagai ketua *Inter-Parliamentary Union* (IPU) Indonesia diberikan tugas untuk memimpin delegasinya di London, Inggris. Beliau menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi pemimpin delegasi diantara delegasi-delegasi negara lainnya sehingga menarik perhatian orang-orang disekelilingnya tidak terkecuali Ratu Elizabeth II sebagai tuan rumah. Ratu menyatakan kekagumannya pada Indonesia karena berani mengiriskan ketua delegasi perempuan yang dimana perempuan pada saat itu jarang ditampilkan dalam kancah internasional atau dikirimkan sebagai perwakilan dalam suatu pertemuan internasional. Dalam konferensi ini setiap ketua delegasi diberikan waktu 15 menit untuk mengomunikasikan masalah-masalah yang terjadi di setiap negaranya. Sebagai perwakilan dari Indonesia Supeni tampil ke mimbar untuk menjelaskan mengenai masalah yang terjadi di Indonesia pada saat itu, keterbatasan waktu yang diberikan dimanfaatkan beliau secara baik untuk mengutarakan mengenai permasalahan Irian Barat yang saat itu menjadi masalah serius dan mencederai Indonesia. Penyampaian Supeni mengenai masalah Irian Barat tidak berjalan lancar dengan semestinya karena disela-sela pembicaraannya terdapat satu pihak yang menyatakan bahwa tindakan Indonesia menyimpang karena dianggap sebagai bentuk penjajahan pada Irian Barat. Untuk menghindari kesalahpahaman dan anggapan tidak benar terkait masalah Irian Barat dari negara lain, Supeni segera menyangkal pernyataan tersebut hingga menyebabkan perdebatan diantara keduanya, situasi dalam konferensi seketika berubah menjadi tidak kondusif dengan suara tepukan tangan yang gemuruh. Namun peristiwa tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia yakni Irian Barat kembali menjadi sorotan pers Barat dan media

internasional. Irian Barat juga terbit dalam surat-surat kabar yang menarik negara-negara di dunia untuk mengetahui secara jelas mengenai masalah tersebut, pada akhirnya beberapa negara yang paham akan masalahnya berubah haluan dan pro terhadap Indonesia, kemudian mereka akan turut serta mendukung Indonesia dalam PBB (Tista, 1989).

Mundur satu sampai dua tahun dari peristiwa Nasionalisasi Terusan Suez dan Konferensi IPU di London, tepatnya pada tahun 1955 terselenggara sebuah konferensi di Bandung yang dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika (KAA). Konferensi Asia Afrika dilatarbelakangi karena perasaan senasib diantara negara-negara di wilayah Asia dan Afrika yang terperangkap dalam jaring kolonialisme negara Eropa. Walaupun banyak negara yang telah merdeka di sekitar tahun 1945-an tetapi masih sering dijumpai masalah-masalah akibat dari penjajahan. Selain itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan yang memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah negara-negara di dunia tidak mampu memberikan solusi yang baik bagi negara yang bermasalah sehingga semakin memperkuat alasan diselenggarakannya KAA dengan tujuan mencapai perdamaian dunia (Kusmayadi, 2018). KAA berlangsung selama kurang lebih tujuh hari pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Sebagai negara yang menjadi tuan rumah konferensi antar negara membuat Indonesia memiliki citra yang baik di mata internasional, hal ini membuat Indonesia kembali mengajukan penyelenggaraan KAA kedua untuk memelihara perdamaian diantara negara anggota. Soekarno segera memberikan tugas kepada Supeni yang saat itu sudah diangkat menjadi Duta Besar Keliling Indonesia pada 18 September 1960 sekaligus menjadi Pembantu Menteri Luar Negeri untuk menyiapkan pelaksanaan KAA kedua bersama Menteri Luar Negeri Subandrio, dan orang berpengaruh di Asia Afrika yakni Ali Sastroamidjojo (Wulandari, 2022). Diamanati tugas demikian Supeni segera bergerak untuk memberi kabar secara langsung kepada perwakilan negara-negara anggota yang berada di Jakarta dan mengirim surat kepada perwakilan yang tidak berada di Jakarta, secara tersurat Supeni menghendaki bahwa setiap perwakilan harus menghubungi negaranya untuk menanyakan mengenai kesiapan pelaksanaan KAA kedua termasuk untuk tempat dan waktunya. Namun di tengah-tengah persiapan dan masing-masing negara telah menyetujui KAA kedua terdapat hambatan yaitu Subandrio sebagai Menteri Luar Negeri menyangkal bahwa Supeni tidak memiliki wewenang atas tugas tersebut melainkan Suwito Kusuma Widagdo sebagai Pembantu Menteri Luar Negeri urusan politik yang seharusnya melakukannya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan KAA kedua tertunda (Tista, 1989).

Diplomasi untuk pelaksanaan KAA kedua dilakukan kembali setelah sepuluh tahun terselenggaranya KAA pertama, kemudian diadakan Konferensi Persiapan Tingkat Menteri di Jakarta untuk menentukan tempat dan tanggal pelaksanaan KAA kedua yang akhirnya disepakati di Aljazair pada tahun 1965. Supeni kembali ditugaskan untuk mengunjungi sebanyak 22 negara di Afrika antara lain Mesir, Libia, Maroko, Aljazair, Somalia, Malawi dan lain-lain. Selain itu, Supeni juga ditugaskan mendatangi negara Pakistan, Turki, Irak, Arab, Syria, Lebanon, dan Kuwait. Supeni diterima baik oleh negara-negara di Afrika karena sebelumnya telah terjalin hubungan baik dengan Indonesia. Sebagai duta besar keliling kontribusi Supeni di bidang diplomasi sangat dibutuhkan terutama untuk melobi

negara-negara yang bersangkutan. Dari negara satu ke negara lain Supeni berkeliling ke kawasan Afrika mengomunikasikan mengenai surat dari Soekarno selaku Presiden Indonesia terkait konferensi, namun KAA kedua tidak kunjung terlaksana karena beberapa masalah seperti peledakan bom pada gedung konferensi di Aljazair dan penurunan Ben Bella dari kursi pemerintahan. Hal ini membuat situasi di Aljazair semakin tidak kondusif sehingga tidak memungkinkan untuk tetap dilaksanakan konferensi dalam waktu yang dekat, dengan demikian KAA kedua kembali ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan (Tista, 1989).

Negosiasi untuk pelaksanaan KAA kedua telah dilaksanakan dengan baik oleh Supeni walaupun masih belum menemukan titik terang pelaksanaannya, beliau kembali ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengunjungi pemimpin negara yang akan terlibat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok. Konferensi ini berangkat dari kesepakatan antara Soekarno (Indonesia), Gamal Abdul Nasir (Mesir), dan Joseph Bros Tito (Yugoslavia). KTT Non-Blok nantinya dihadiri oleh negara-negara netral yakni tidak memihak antara Blok Barat dan Blok Timur yang terlibat dalam perang dingin. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkuat gerakan anti kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme di negara-negara yang pernah mengalami praktik-praktik tersebut di seluruh kawasan seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Supeni ditugaskan untuk mengunjungi beberapa negara seperti Srilangka, Kamboja, Burma, dan lainnya, dalam hal ini beliau menyampaikan surat dari Presiden Soekarno yang berisi mengenai konferensi tingkat tinggi yang akan diselenggarakan dan juga pesan lisan mengenai Aljazair yang akan dipecah menjadi dua oleh Perancis. Di negara-negara tersebut Supeni disambut dengan hangat oleh para pemimpinnya dan mendapatkan respon yang positif juga. Setelah berkeliling ke negara-negara bersangkutan Supeni kembali ke Indonesia untuk menyiapkan pelaksanaan Konferensi Persiapan Tingkat Menteri di Kairo sebelum berlangsungnya KTT Non-Blok. Supeni diberikan tanggung jawab untuk memimpin sidang karena mewakili Indonesia sebagai negara sponsor, sidang berjalan dengan lancar walaupun pada awalnya delegasi India tidak menyetujui jika Aljazair diundang ke konferensi dengan alasan negara tersebut belum menjadi negara yang merdeka. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Supeni, secara sigap beliau melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Jawaharlal Nehru agar menyetujui Aljazair untuk mengikuti KTT tersebut hingga pada akhirnya Nehru setuju dan bersedia untuk mengikuti KTT Non-Blok di Beograd pada 1-6 September 1961. KTT Non-Blok ini nantinya melahirkan suatu gerakan anti Blok Barat maupun Blok Timur dengan nama Gerakan Non-Blok (GNB). GNB memiliki tujuan yaitu kemerdekaan bagi negara terjajah, perdamaian dunia, kerjasama internasional, keamanan internasional, dan perubahan ke arah yang lebih baik (Azmi, 2017).

Misi Pembebasan Irian Barat oleh *The Irian Lady*

Berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag menghasilkan beberapa poin penting salah satunya yaitu Belanda mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia, namun terdapat poin yang harus digarisbawahi karena dinilai terlalu mementingkan salah satu pihak. Belanda tetap mempertahankan Irian Barat dan tidak mengakuinya

sebagai wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda beranggapan bahwa Irian Barat tidak termasuk sebagai wilayah dari Indonesia sehingga dengan leluasa tetap menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari koloninya (Husin, 2022). Selain itu Belanda juga menyebutkan bahwa Irian Barat dan Indonesia tidak memiliki kesamaan dari etnis dan budayanya. Belanda memberikan janji bahwa kedaulatan Irian Barat akan diserahkan setelah satu tahun pelaksanaan KMB, namun Belanda tidak kunjung menepati janjinya dan membuat Indonesia geram akan sikapnya yang semena-mena. Belanda bersikukuh untuk mempertahankan Irian Barat sedangkan Indonesia terus menuntut Belanda untuk mengembalikan Irian Barat dan memberikan kedaulatan sepenuhnya, keduanya saling berebut wilayah Irian Barat dan menjadikan keadaan semakin rumit. Upaya pembebasan Irian Barat oleh Indonesia dilakukan sejak masa Kabinet Natsir pada tahun 1950, Indonesia mengirim perwakilan delegasinya yaitu Mr. Mohammad Roem untuk berunding bersama Belanda dengan harapan mendapatkan jalan tengah yang baik bagi kedua negara tetapi yang diperoleh hanya jalan buntu. Tidak pantang menyerah, Indonesia terus memperjuangkan Irian Barat melalui berbagai cara. Presiden Soekarno mengambil tindakan nyata berupa pembentukan Biro Irian pada 5 Oktober 1954 untuk melakukan koordinasi dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perjuangan pembebasan Irian Barat.

Biro Irian merupakan wadah bagi para tokoh pejuang Irian Barat dalam mengambil langkah teknis untuk pengakuan Irian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biro Irian memiliki susunan sebagai mana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Biro Irian Barat

Dewan Pimpinan	Badan Pengurus	Badan Penasehat
1. Perdana Menteri sebagai ketua	1. Dr. D.S. Diapari sebagai ketua	1. Mr. Teng Tjin Leng
2. Wakil Perdana Menteri II	2. Mustadjab	2. Prof. Dr. Supomo
3. Menteri Luar Negeri	3. I.R. Lobo	3. Mr. A.M. Tambunan
4. Menteri Dalam Negeri	4. O. Rondonuwu	4. J. Tapamahu
5. Menteri Kehakiman	5. Sutomo	5. Dr. Suparmo
6. Menteri Penerangan	6. A.S. Bachmid	6. Prof. Dr. H. Johannes
7. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan	7. Sugoro	7. M.A. Pellaupessy
	8. Latumahina	
	9. Drs. G.A. De Neve	
	10. G.J. Claessen	
	11. Ny. Supeni	
	12. Dr. Abu Hanifah	
	13. Mr. Hamid Algadri	
	14. Arudji Kartawinata	
	15. P.A. de Queljoe	
	16. Ny. Rangkajo Rasuna Said	
	17. Ny.Sri Mangunsarkoro	

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Para anggota Biro Irian ini mampu menempatkan Irian Barat secara *de facto* menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk provinsi Irian Barat lengkap beserta susunan pemerintahan daerahnya. Biro Irian resmi dinonaktifkan pada 9 Juni 1956 karena tugasnya telah selesai dan tidak diperlukan lagi. Walaupun dianggap berhasil mendapatkan pengakuan secara *de facto* wilayah Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, berbagai perundingan yang dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak nyaris tidak pernah tercapai dan mengalami kegagalan. Untuk itu pemerintah Indonesia berusaha membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan penjaga perdamaian dan keamanan dunia. Usulan yang diajukan berupa permohonan bantuan kepada negara-negara anggota PBB dalam penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia mengenai Irian Barat. Namun langkah yang diambil ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Indonesia, para negara anggota PBB terutama negara-negara Barat lebih pro terhadap Belanda terlebih lagi Belanda berusaha mendaftarkan Irian Barat ke dalam jajaran konstitusinya. Tindakan Belanda yang bersikap curang dan mencoba mempermalukan Indonesia di depan PBB membuat Indonesia semakin geram hingga keduanya semakin bersitegang (Adams, 2014:).

Kurangnya dukungan kepada Indonesia di dunia internasional terkait masalah Irian Barat membuatnya mengambil langkah lain yaitu membawa masalah ini ke Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Indonesia bermaksud meminta bantuan kepada negara-negara anggota konferensi untuk mendukung Indonesia dalam membebaskan daerah yang menjadi haknya. Beberapa negara di Afrika tidak memahami mengenai masalah Irian Barat yang terjadi dan menganggap masalah tersebut tidak perlu dibahas dalam forum KAA. Usaha demi usaha dilakukan untuk melobi negara-negara di Afrika maupun Asia yang terpengaruh pemikiran Barat dan tergabung dalam organisasi Amerika Serikat agar dapat berpaling mendukung Indonesia dalam misi pembebasan Irian Barat (Bupu & Sumarjiana, 2021). Supeni di bawah perintah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo melakukan pendekatan ke negara-negara tersebut. Untuk memperkuat gagasannya beliau mengajukan rumusan "*The Asian-African conference support the position of Indonesia on West Irian*" rumusan ini diharapkan menjadi sesuatu yang dapat dipahami walaupun dalam perjuangannya melewati kesulitan-kesulitan seperti tuntutan Indonesia atas Irian Barat yang dianggap menyalahi hukum oleh media internasional. Kerja keras yang dilakukan Supeni saat KAA berbuah manis, para anggota berusaha mendesak PBB agar dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Selain itu untuk memperkuat dukungannya di PBB Supeni melakukan lobi di berbagai forum seperti Konferensi Uni antar Parlemen di London dan Brazil serta *Asia-Pacific Relations Conference* di Lahore (Tista, 1989).

Dalam mengupayakan Irian Barat Presidem Soekarno melakukan kunjungan ke negara-negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan kampanye politiknya. Kemudian untuk menekan Belanda beliau menyebarluaskan mengenai pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikor) yang akan dilakukan pada 19 Desember 1961, Trikor berisi tiga tuntutan sebagai berikut: 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda; 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan Tanah Air dan Bangsa

(Tista, 1989). Pelaksanaan operasi Trikora tidak terlepas dari peranan Komando Mandala yang bertugas melancarkan operasi militer di wilayah Irian Barat, Presiden Soekarno mengerahkan pasukan TNI AD, AU, dan AL untuk berjuang di titik-titik yang sudah ditentukan. Adanya operasi militer ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pasukan yang berjuang manakala diserang terlebih dahulu sebelum berhasil mendarat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden Soekarno mengirimkan Supeni sebagai Duta Besar Keliling ke Filipina menemui Emmanuel Pelaez untuk berkompromi mengenai dukungannya terhadap Indonesia dalam mencegah adanya serangan dari Amerika di Irian Barat dan Pelaez menyanggupinya. Setelah melewati perjalanan panjang dalam memperjuangkan Irian Barat pada akhirnya Indonesia dapat menikmati angin segar. Irian Barat resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 dan Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh atas wilayahnya (Susetyo & Ravico, 2020). Sumbangsih Supeni dalam pembebasan Irian Barat terutama dalam melobi negara-negara di dunia membuatnya dikenal sebagai *The Irian Lady*.

Narasi Perempuan dalam Pembelajaran Sejarah

Sebagai tokoh pergerakan perempuan yang keberadaannya jarang diketahui banyak orang, Supeni dapat dikatakan menjadi pengenalan tokoh baru dalam penulisan sejarah maupun pembelajaran sejarah di sekolah. Sosok Supeni diharapkan dapat menghiasi penulisan sejarah di Indonesia, mengingat terbatasnya ruang untuk membahas tokoh perempuan tanpa mengaitkannya dengan tokoh laki-laki. Dalam pembelajaran sejarah Supeni menjadi salah satu tokoh yang jasanya perlu dijabarkan untuk dapat dipelajari dan diteladani oleh para siswa. Namun penulisan sejarah mengenai Supeni akan dihadirkan dalam narasi sejarah perempuan yang memfokuskan pada kehidupan perempuan yaitu bagaimana perempuan dalam rumah (domestik), bagaimana perempuan mengembangkan dirinya, dan bagaimana perempuan dalam masyarakat (publik). Seperti yang diketahui penggambaran perempuan dalam peristiwa sejarah selalu mengambil sisi maskulin laki-laki dan hanya menampilkan perempuan elit yang berasal dari kalangan atas atau kalangan ningrat seperti R.A Kartini. Perempuan pada masa awal kemerdekaan menjadi pelaku sejarah dan memiliki keterlibatan yang besar untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti dalam peristiwa Pertempuran 10 November 1945 perempuan memegang peran penting dalam suatu wadah organisasi yang biasa disebut Pemuda Puteri Republik Indonesia (PPRI). PPRI mewadahi perempuan dalam melakukan perjuangan seperti penyediaan dapur umum, membantu korban perang melalui Palang Merah Indonesia (PMI), bahkan berani menjadi mata-mata dan biro penghubung komunikasi antar kota (Nurhayati et al., 2023).

Pembelajaran sejarah menjadi sarana untuk memperkenalkan mengenai sejarah perempuan yang berisikan tokoh-tokoh perempuan sebagai pelaku sejarah yang dituliskan berdasarkan perspektif dan dimensi perempuan. Sejarah perempuan dinarasikan dapat berdiri sendiri berdampingan dengan sejarah laki-laki karena keduanya merupakan makhluk hidup yang diciptakan untuk saling melengkapi (Nuryanti & Akob, 2019). Dalam buku "Supeni Wanita Utusan Negara" karya Paul Tista penggambaran Supeni masih menyentuh sifat maskulin bukan feminis, dimana sosok Supeni digambarkan sebagai perempuan yang tangguh dan berani melawan ketidakadilan akibat

dominasi dari penjajah asing maupun dominasi laki-laki, namun hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diulas. Kata melawan selalu menjadi kata kunci saat membahas mengenai perempuan dalam sejarah, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang harus terus melawan untuk dapat sejajar dengan laki-laki dan memperoleh hak-haknya. Padahal penulisan mengenai sejarah perempuan dapat dikaji tanpa pengantar yang demikian, perempuan seharusnya memiliki hak-haknya di berbagai aspek kehidupan sama halnya dengan laki-laki, perempuan tidak selemah seperti apa yang digambarkan dalam penulisan-penulisan sejarah, serta tidak perlu melawan untuk dapat berdiri sendiri sebagai seorang perempuan. Poin-poin tersebut dapat dimunculkan menjadi suatu rumusan masalah untuk penulisan sejarah perempuan tanpa menyinggung kelemahan dari salah satu pihak baik perempuan itu sendiri maupun laki-laki.

Harmonisasi antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari hubungan antara Supeni dan Soekarno yang terjalin selayaknya guru dan murid. Supeni sangat mengagumi sosok Soekarno, proklamator Indonesia di hidupnya, beliau ingin menjadi seseorang seperti Soekarno yang terlibat langsung dalam politik dengan pemikiran-pemikiran cemerlangnya. Sebagai perempuan yang memiliki ambisi tinggi untuk berpolitik Supeni tidak segan untuk bergabung ke PNI yang dipelopori Soekarno, dari keterlibatan dan kepiawaiannya dalam bidang politik membuat beliau seringkali mendapatkan tugas-tugas penting negara. Hubungan timbal balik antara keduanya selaras dengan pemikiran Soekarno mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Para perempuan di dunia berusaha menyetarakan haknya dengan kaum laki-laki dengan semangat yang menggebu-gebu hingga menganggap laki-laki adalah musuhnya, dari yang awalnya berusaha menyetarakan alih-alih menggeser hak laki-laki dan membangun stereotip bias gender. Menurut beliau perempuan dan laki-laki tidak akan dapat dipisahkan peranannya dalam satu lingkup kehidupan sehingga diperlukan persatuan untuk mencapai kesetaraan diantara keduanya (Soekarno, 1965). Narasi ini ditampilkan untuk memunculkan historiografi yang netral tidak dominan antara laki-laki dan perempuan, jadi antara sejarah laki-laki dan sejarah perempuan memiliki posisi seimbang dalam penulisan sejarah di Indonesia.

Pada hakikatnya proses pemunculan tokoh perempuan dalam sejarah perempuan harus dituliskan sebagaimana mestinya perempuan, bahwa perempuan sebagai manusia memiliki dua peran baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Dalam hal ini Supeni sebagai tokoh pejuang pergerakan perempuan memiliki peran domestik yaitu sebagai seorang anak beliau memiliki kewajiban untuk berbakti pada orang tuanya, sebagai seorang istri beliau melayani suaminya, memasak, dan mengurus rumah tangga, sebagai seorang Ibu beliau mengurus dan mendidik anak-anaknya. Multi peran yang dimainkan Supeni membawa pembahasan yang kompleks, perempuan dapat melaksanakan peran-perannya sebagai seorang manusia yang utuh dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Di ranah publik Supeni tampil sebagai diplomat, Duta Besar Keliling, Ketua organisasi Wanita, dan menapaki bagian-bagian penting dalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran yang sama baik dalam ranah domestik maupun publik, namun yang menjadi perbedaan adalah porsi pada setiap individunya. Supeni tampil dengan

pemikiran-pemikiran luas terutama mengenai peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perempuan harus bersatu tanpa memandang latar belakang yang berbeda-beda dengan menerapkan dasar-dasar proklamasi sehingga dapat menetapkan posisinya sama dengan laki-laki, sesuai pasal 27 UUD 1945 tentang persamaan hak warga negara (Tista, 1989). Dalam hal ini perempuan harus memiliki persamaan hak untuk memilih pekerjaan layaknya laki-laki dan hak untuk memilih dan dipilih. Secara lebih kompleks perempuan harus dijamin memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan diperlakukan sama rata dengan laki-laki di hadapan hukum negara maupun hukum adat, sehingga akan tercipta masyarakat yang merdeka dan Sejahtera (Soekarno, 2014).

Dalam pembelajaran sejarah baiknya narasi mengenai perempuan disajikan dalam satu konsep bernama “Sejarah Perempuan” yang membahas segala sesuatu yang berkaitan mengenai kehidupan perempuan sehari-hari, peranannya sebagai manusia, sisi feminisme, dan nilai-nilai yang dapat dihadirkan untuk generasi selanjutnya. Perempuan dinarasikan dalam satu bab yang masih berkaitan dengan pembahasan materi pada setiap sub-bab dalam buku sejarah dengan menampilkan tokoh-tokoh perempuan beserta kehidupannya sosialnya, selain itu pembahasannya dilengkapi dengan profil-profil perempuan dan pentingnya perempuan dalam historiografi khususnya bagi pembelajaran sejarah di Indonesia.

SIMPULAN

Dikotomi varian perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dibedakan dalam diplomasi dan perjuangan fisik, dalam batas tertentu berbanding lurus dengan logika pembedaan *macho* dan *non macho*. Perkembangan historiografi di Indonesia masih belum terlepas dari cara pandang patriarki, di mana perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua atau *the second sex*. Jikapun diangkat dalam historiografi, sosoknya dikemas sedemikian rupa menjadi maskulin, dan cenderung *macho*. Perempuan digambarkan seolah-olah memiliki sifat seperti laki-laki yang berani untuk melawan kolonialisme melalui perlawanan fisik di daerah-daerah tertentu sedangkan jika dikemas dengan penggambaran perempuan yang feminin selalu dikaitkan dengan peranan domestik. Padahal perempuan dalam historiografi dapat dihadirkan melalui peran publik di luar konsep maskulin-*macho* seperti pada bidang politik jalur diplomasi. Diplomasi yang sejak Proklamasi digawangi oleh tokoh laki-laki, di tahun 1950-1960-an membuka ruang bagi keterlibatan perempuan, dalam hal ini adalah Supeni Pudjobuntoro. Narasi Kiprah Supeni Pudjobuntoro dalam bidang diplomasi meniscayakan pendobrakan diskriminasi berlapis historiografi yang maskulin. Beliau membongkar dominasi narasi perjuangan fisik yang militeristik-*macho* dan beliau pun menembus dominasi tokoh laki-laki pada periode mempertahankan kemerdekaan hingga senjakala Orde Soekarno. Kiprahnya dalam bidang politik yang dimulai setelah kemerdekaan menjadikannya sebagai orang kepercayaan Presiden Soekarno yang sering diberikan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas negara khususnya terkait politik luar negeri. Supeni menjalankan multi peran di ranah domestik sebagai sebagai Ibu, anak, dan istri sedangkan di ranah publik sebagai politisi, duta besar keliling, diplomat, dan jurnalis. Supeni tergabung dalam PNI dengan diberikan

tanggung jawab yang besar seperti terlibat untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum pertama, menjadi duta besar keliling Indonesia untuk urusan politik luar negeri melobi negara-negara yang bersangkutan, dan turut serta dalam pembebasan Irian Barat dari Belanda. Kepiawaian Supeni dalam berpolitik dan jasa-jasa lain yang beliau berikan kepada Indonesia dapat dihadirkan dalam narasi sejarah perempuan yang utuh tanpa dikaitkan dengan maskulinitas laki-laki, dalam pembelajaran sejarah Supeni dijabarkan melalui sudut pandang perempuan sehingga para siswa dapat mempelajarinya dengan penghayatan jiwa zaman yang membawa pemikiran kompleks bahwa sejarah tidak hanya ditempati laki-laki sebagai aktor utama sebagai pelaku sejarah melainkan perempuan juga ikut andil di dalamnya membentuk sejarah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, C. (2014). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (S. Hadi (ed.)). Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno.
- Agustiningih, E. P. (2019). Pergerakan Perempuan Di Minangkabau: Kiprah Rohana Kudus Dalam Nasionalisme Tahun 1912-1972. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3(2), 269. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>
- Ananta Tour, P. (2003). *Panggil Aku Kartini Saja*. Lentera Dipantara.
- Ajeng, K.A. (2016). Partai Nasional Indonesia Dalam Pemilu 1955 Di Jakarta [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/33193/>
- Azmi. (2017). *Guide Arsip Tematis Gerakan Non Blok 1961-1992*.
- Blackburn, S. (2007). *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.
- Bupu, T. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2021). Operasi Trikora Sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 11(1), 9–19.
- Djaja, T. (1980). *Rohana Kudus srikandi Indonesia Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Mutiara.
- Erasiah. (2019). Terusan Suez: Jalan Menuju Kemakmuran Kolonial. *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/khazanah.voio.190>
- Fitriyanti. (2001). *Roehana Koeddoes Perempuan Sumatera Barat*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Gautama, C. (2005). *Kartini Dari Sisi Lain Melacak Pemikiran Kartini Tentang Emansipasi Bangsa*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Harari, Y. N. (2011). *Sapiens: A Brief History of Humankind*. London: Vintage.
- Hidayat, R. (2011). *Dewi sartika, srikandi tanah Parahyangan*. CV. Ghina Walafafa.
- Husin, H. (2022). Konflik Indonesia-Belanda: Upaya Mengembalikan Irian Jaya Kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi. *Wiksa*, 1(1). <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/wiksa/article/viewFile/5895/1507>
- Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI). (2021). *Dewi Sartika* (A. Kosasihi (ed.)). esensi.

- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Kawat, N. . (1953, January 10). *De Nieuwsgier*.
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.423>
- Khasyi'in, N. (2021). Perkembangan Islam Dan Pendidikan Agama Islam di India. *JIPKL: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 1(Desember), 1–13.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kusmayadi, Y. (2018). Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 Terhadap Kemerdekaan Negara-Negara Di Benua Afrika. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(01), 15. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.1586>
- Mauliyah, N. I., & Sinambela, E. A. (2019). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.7>
- Metzelaar, N. (1953, January 8). *Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-indie*.
- Notosusanto, N. (2011). *SNI VI Zaman Jepang dan Zaman Republik* (Nurhamzah (ed.)). Balai Pustaka.
- Nurhayati, D., Haffata Yahfitu Zahra, W., Hatmoko, D., Achmad Satria Utama, M., Nur Kholid, M., Syahrul Ulum, M., Harmaji, Riyandika, F., & Hanania Badrina, A. (2023). *Bara Api Kemerdekaan* (N. Munib (ed.)). Pelestari Sejarah-Budaya Kadhiri (PASAK).
- Nuryanti, R., & Akob, B. (2019). *Perempuan dalam Historiografi Indonesia*. Deepublish.
- Nuryanti, R. (2007). *Perempuan Dalam Hidup Sukarno: Biografi Inggit Garnasih*. Ombak.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Prastio, L. O., Abdillah, Nurlia, E., & Tati. (2021). *Journal of Governance and Local Politics*. *Journal of Governance and Local Politics*, 03(02), 2021. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/jglp/index>
- Prayuda, R. (2019). *Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 105–109. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3268>

- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264.
<https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rachman, D. (2020). *Kisah-kisah Istimewa Inggit Garnasih*. Menara API.
- Rahayu, R. I. (2014). *Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris*.
- Schaap, C. H. (1957, June 17). *Het nieuwsblad Voor Sumatra*.
- Soekarno. (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Bangkitlah Bangsa.
- Soekarno. (2014). *Sarinah* (S. Astari Rasjid (ed.)). Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno.
- Soewito, I. H. N. H., Widati, S. R. W., & Pour, J. (1997). *Lasmidjah Hardi, Perjalanan Tiga Zaman*. PT Grasindo.
- Subekti, A. (2021). Tinjauan Konseptual Perempuan Dan Modernitas Dalam Ruang Kolonialisme. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1), 183.
<https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p183-194>
- Suroto, S. (2019). Presiden Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan. *Spektrum Hukum*, 14(2), 232.
<https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1079>
- Stuers, C. V. De. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Susetyo, B., & Ravico. (2020). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Papua Tahun 1949-1963. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(1), 112–126.
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.14>
- Tista, P. (1989). *Supeni Wanita Utusan Negara* (A. Mattheus (ed.)). PT. PEMBIMBING MASA. Anggota IKAPI.
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. 13(1).
<https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>
- Utama, S. W. (2017). Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme. *Marjin Kiri*.
- Utami, I. W. P. (2021). Colonialism, Race, and Gender: A Multimodal Analysis of an Indonesian Textbook. *Jurnal Sejarah*, 4(1), 68–82. <https://doi.org/10.26639/js.v4i1.327>
- Yulia, D. (2016). Perspektif Gender Dalam Historiografi Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 5(2), 1–6.
<https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.12>